

**PENGARUH BELANJA DAERAH, KEMISKINAN, DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Hayrun Nisa Eka Afriliani



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENGARUH BELANJA DAERAH, KEMISKINAN, DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Hayrun Nisa Eka Afriliani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA DAERAH, KEMISKINAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

Oleh

HAYRUN NISA EKA AFRILIANI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2015 - 2020 di 15 kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung menggunakan model FEM (*Fixed Effect Model*). Variabel terikat yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel bebas meliputi belanja daerah sektor pendidikan, belanja daerah sektor kesehatan, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable belanja daerah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Variabel belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Sedangkan variable kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Daerah, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL EXPENDITURES, POVERTY, AND OPEN UNEMPLOYMENT LEVELS ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN LAMPUNG PROVINCE

BY

HAYRUN NISA EKA AFRILIANI

This research aims to analyze the effect of regional spending, poverty, and the open unemployment rate on the Human Development Index in regencies/cities throughout Lampung Province. This study uses panel data from 2015 - 2020 in 15 regencies and cities throughout Lampung Province using the FEM (Fixed Effect Model) model. The dependent variable used is the Human Development Index (IPM) and the independent variables include regional spending in the education sector, regional spending in the health sector, poverty, and the open unemployment rate. The results showed that the regional spending variable in the education sector had a positive effect on the Human Development Index in regencies/cities throughout Lampung Province. The regional expenditure variable for the health sector has no significant effect on the Human Development Index in regencies/cities throughout Lampung Province. Meanwhile, the variable poverty and open unemployment rate have a negative and significant effect on the Human Development Index in regencies/cities throughout Lampung Province.

Keyword: Human Development Index, Regional Expenditure, Poverty, Unemployment Rate

Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA DAERAH, KEMISKINAN,
DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Hayrun Nisa Eka Afriliani**

Nomor Induk Mahasiswa : **1711021022**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

NIP 19670710 199003 2 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.

NIP 19631215 198903 2 002

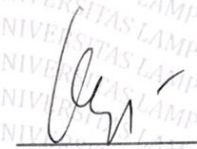
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

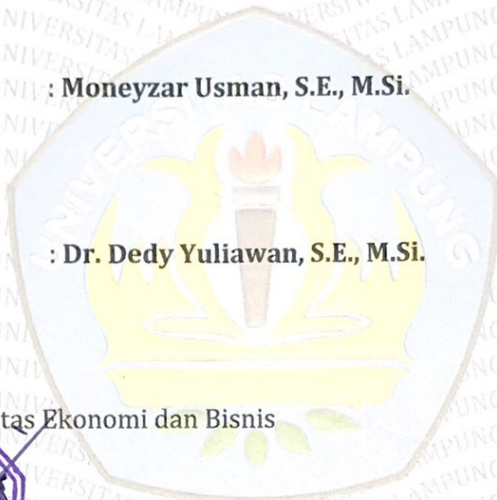
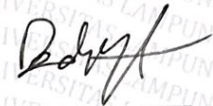
Ketua : Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.



Penguji I : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Dedy Yulianan, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
MP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 September 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 September 2023

Penulis



Hayrun Nisa Eka Afriliani

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 April 1999, sebagai putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Marwani dan Ibu Herawati. Penulis memiliki dua adik laki-laki bernama Dika Rahmansyah dan Abu Anshar.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Sandhy Putra (Telkom) Bandar Lampung. Kemudian menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Al Kautsar Bandar Lampung, dan sekolah menengah atas di SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

Penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis mengambil konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal. Selama menjadi mahasiswa penulis terdaftar sebagai Anggota dan Staff Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa), dan Kepala Bidang Dana dan Usaha di Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) PIK R RAYA Universitas Lampung 2019/2020.

Pada tahun 2019, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, dan Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2020, di Desa Badak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

-QS. Ali Imran:139

“Progress is progress no matter how small”.

-Henry Ford

“Long Story Short, I Survived”

-Taylor Swift

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

*Dengan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan,
ku persembahkan skripsi ini kepada keluarga ku tercinta,*

Untuk Kedua Orang Tuaku, Ibu Herawati dan Ayah Marwani

Terimakasih kepada Ibu & Ayah yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi untuk kesuksesanku hingga saat ini. Berkat Ibu & Ayah lah semuanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran dalam mendidik, nasihat, cinta dan kasih sayang, serta lantunan doa yang tak pernah henti kalian berikan kepadaku hingga menjadi kekuatanku dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Untuk Adik-adik ku, Dika dan Abu

Terimakasih atas semua doa serta dukungannya selama ini, terimakasih juga telah menjadi motivasi dan pengingatku selama hidup.

Serta

Almamater tercinta

Universitas Lampung

Semoga karya kecil ini bermanfaat

SANWANCANA

Bismillahirrahmaanirrohiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah, Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis masih sangat terbatas. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya bimbingan, dukungan serta saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

5. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas seminar proposal dan seminar hasilyang telah memberikan tanggapan, kritikan dan juga sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku tercinta, Ibu Herawati dan Ayah Marwani yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang terbaik kepada penulis, serta adik-adikku tersayang, Dika Rahmansyah dan Abu Anshar, terima kasih untuk semua doa serta dukungannya selama ini. Semoga kalian bisa melakukan pencapaian yang lebih baik dari Kanjeng.
11. Sahabat-sahabat semasa kuliah, anak-anak Himalang: Afril, Ulul, Rizka, Putri, Yunda, Reza, Galang, Rais, dan Vicky. Terima kasih atas semua kebaikan, motivasi, doa serta dukungan kalian dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga atas bantuan, semangat, penghiburan serta kesetiaan yang telah kalian berikan kepada penulis.
12. Sahabat semasa sekolah, Izzatia, Nabila, Shintya, Ratna, Endah, Junira, Nuril, Farah, dan Meysa. Terima kasih telah memberikan cerita dan kenangan menarik selama masa pertemanan kita. Sukses terus untuk kalian semua.
13. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2017, dan juga teman-teman sekonsentrasi ekonomi publik dan fiskal, serta teman-teman yang menemani perjuangan akhirku, Rida, Fitria, Fera, Diki, Junior, Deri serta teman-teman

yang tergabung dalam grup “kampus gak?”. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2020, Desa Badak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Kak Anjel, Prisil, Danti, Syifa, Kak Robby dan Dedy. Terima kasih atas cerita, kenangan, pengalaman dan kesabaran kalian selama 40 hari kebersamaan kita. Semoga sukses untuk kita semua.
15. Almamater yang kebanggakan, Universitas Lampung.
16. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 5 September 2023

Penulis

Hayrun Nisa Eka Afriliani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Teoritis.....	13
B. Tinjauan Empiris	26
C. Kerangka Pemikiran	31
D. Hipotesis	32
III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian	33
B. Definisi Operasional Variable	33
C. Metode Analisis	36
D. Prosedur Analisis Data	37
1. Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	37
2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel	38
3. Uji Asumsi Klasik.....	39
4. Pengujian Hipotesis	40
5. Koefisien Determinasi (R^2).....	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	42
B. Uji Asumsi Klasik.....	43
1. Uji Normalitas	43
2. Uji Multikolinieritas	45
3. Uji Heterokedastisitas.....	45
C. Hasil Pengujian Regresi Data Panel.....	46
1. Uji Kriteria Pemilihan Model Penelitian.....	46
2. Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel.....	47
3. Pengujian Hipotesis	48
4. Koefisien Determinasi (R^2)	50
D. Pembahasan Hasil Penelitian	50
1. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	51
2. Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	52
3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	54
4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	55
5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	57
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2020	3
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2020	4
3. Hubungan Jumlah Persentase Penduduk Miskin dengan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2020	6
4. Hubungan Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2020	8
5. Alokasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2015-2020.....	9
6. Alokasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2015-2020	10
7. Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum IPM.....	19
8. Ringkasan Hasil Penelitian	26
9. Ringkasan Variabel Penelitian	33
10. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	42
11. Hasil Uji Multikolinieritas, Correlation	45
12. Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
13. Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	47
14. Hasil Uji Chow.....	47
15. Hasil Uji Hausman	48
16. Hasil Regresi Model FEM	49
17. Perbandingan Uji Statistik dan Uji Tabel	50
18. Nilai Cross-Section Fixed Effect Setiap Provinsi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	31
2. Uji Normalitas.....	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menegaskan bahwa manusia adalah tujuan utama dari proses pembangunan, bukan sekadar alat untuk mencapai pembangunan itu sendiri. Manusia memiliki peran sentral dalam proses pembangunan dan dianggap sebagai subjek yang aktif dalam proses ini. Pendekatan ini mengartikan bahwa pembangunan berfokus pada kesejahteraan, kebutuhan, dan kepentingan seluruh masyarakat. Pentingnya pembangunan manusia terletak pada tujuan mendasarnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar warga negara bisa menikmati kehidupannya dengan sehat dan memiliki peluang melakukan hal yang produktif. Oleh karena itu, pembangunan tidak sekadar berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, kesehatan, dan kualitas hidup secara komprehensif. Konsep pembangunan manusia mengusung ide bahwa manusia adalah pusat dari setiap upaya pembangunan, dengan sasaran akhir berupa penguasaan sumber daya, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendidikan (Sangkereng et al., 2019)

Ada tiga alasan utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan makhluk hidup. Satu, meskipun negara berkembang jumlahnya banyak, telah mencapai pertumbuhan dengan baik dan signifikan, termasuk Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Kedua, beberapa negara berpenghasilan tinggi masih mengalami masalah sosial seperti AIDS, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, tunawisma, dan kejahatan rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpenghasilan rendah masih menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah sosial.

United Nations Development Programme (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menekankan bahwa pesan utama dari masing-masing laporan tentang pembangunan manusia tingkat internasional, nasional, dan regional, adalah bahwa manusia adalah tujuan terakhir pembangunan, tidak hanya alat untuk melakukannya. UNDP menentukan indeks menjadi alat yang luas untuk mengukur kemajuan pembangunan daripada mengukur pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara terpisah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tolak ukur angka sebuah wilayah yang sejahtera dilihat dari 3 dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh nilai IPM yang tinggi. (UNDP, 1990). Dalam pembangunan perekonomian modern, IPM sangat penting karena tingkat perbaikan kualitas masyarakat yang tepat akan memungkinkan setiap unsur produksi untuk maksimal. Inovasi masyarakatlah yang bisa memperbaiki kualitas produktivitas baik dari perluasan tenaga kerja dan kesejahteraan penduduk (Masriah, 2011) dalam (Ningrum et al., 2020). Indonesia termasuk kategori negara yang berkembang, menghadapi permasalahan mengenai pembangunan yang berkaitan pada manusia yang menarik untuk diperdebatkan. Kita tahu bahwa teori pembangunan perekonomian yang lebih mengutamakan tumbuh, kembang dari sumber daya manusianya serta keperluan primer, masalah pembangunan berkaitan pada manusia ini mempunyai sudut pandang yang luas.

Menurut Salim dkk (2003) dalam (Kamilia & Widiastuti, 2017) sebenarnya pembangunan kualitas manusia adalah upaya untuk mengoptimalkan kemampuan setiap diri manusia, dan masyarakat yang ada di suatu negara untuk memiliki peran aktif dalam memutuskan masa yang akan datang untuk menggapai kesejahteraan baik material dan spiritual. Indonesia memiliki nilai IPM yang tergolong menengah ke bawah di peringkat dunia. Namun, pada tahun 2019, IPM Indonesia muncul untuk pertama kalinya dalam kategori tinggi, mencapai 0,707, yang menempatkannya dalam kategori pembangunan manusia tinggi karena berhasil menembus nilai minimal dari kategori ini, yang berkisar antara 0,7 dan 0,79. Dari

189 negara di seluruh dunia, Indonesia sekarang menduduki peringkat 111 (UNDP, 2019).

Peringkat IPM Indonesia adalah gabungan dari semua angka IPM pada tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Diharapkan Provinsi Lampung dapat melakukan perubahan yang akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, baik secara jasmani maupun rohani. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memberikan fasilitas baik untuk kesehatan masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan. Salah satu komponen pembangunan manusia adalah lebih mengupayakan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kesehatan yang baik.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2020

No.	Provinsi	IPM	No.	Provinsi	IPM
1	DKI Jakarta	80.77	18	Bengkulu	71.40
2	DI Yogyakarta	79.97	19	Jambi	71.29
3	Kalimantan Timur	76.24	20	Kalimantan Tengah	71.05
4	Kep. Riau	75.59	21	Kalimantan Selatan	70.91
5	Bali	75.50	22	Kalimantan Utara	70.63
6	Sulawesi Utara	72.93	23	Sumatera Selatan	70.01
7	Riau	72.71	24	Lampung	69.69
8	Banten	72.45	25	Sulawesi Tengah	69.55
9	Sumatera Barat	72.38	26	Maluku	69.49
10	Jawa Barat	72.09	27	Gorontalo	68.68
11	Aceh	71.99	28	Maluku Utara	68.49
12	Sulawesi Selatan	71.93	29	Nusa Tenggara Barat	68.25
13	Jawa Tengah	71.87	30	Kalimantan Barat	67.66
14	Sumatera Utara	71.77	31	Sulawesi Barat	66.11
15	Jawa Timur	71.71	32	Nusa Tenggara Timur	65.19
16	Kep. Bangka Belitung	71.47	33	Papua Barat	65.09
17	Sulawesi Tenggara	71.45	34	Papua	60.44

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2020

Pada Table 1 menunjukkan angka IPM menurut provinsi di Indonesia. IPM paling tinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,77. Hal tersebut didukung oleh beberapa hal, pertama peningkatan komponen harapan hidup ketika lahir, kedua lamanya bersekolah. Ketiga rerata lama sekolah dan pengeluaran pemerintah yang disesuaikan pun ikut naik. Kemudian IPM paling rendah berada di Provinsi Papua

yakni 60,44. Sedangkan Provinsi Lampung ada di posisi 24 yakni 69,69. Provinsi sendiri belum dapat bersaing dengan daerah lainnya yang berada di Sumatra. Maka dari itu, IPM belum dilakukan dengan maksimal. Untuk memperbaiki IPM Provinsi Lampung dibutuhkan upaya yang baik dan pemerintah provinsi lampung harus membuat kebijakan yang tepat untuk mencapainya.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2020

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia						Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Lampung Barat	64.54	65.45	66.06	66.74	67.50	67.80	66.35
Tanggamus	63.66	64.41	64.94	65.67	66.37	66.42	65.25
Lampung Selatan	65.22	66.19	66.95	67.68	68.22	68.36	67.10
Lampung Timur	67.10	67.88	68.05	69.04	69.34	69.37	68.46
Lampung Tengah	67.61	68.33	68.95	69.73	70.04	70.16	69.14
Lampung Utara	65.20	65.95	66.58	67.17	67.63	67.67	66.70
Way Kanan	65.18	65.74	65.97	66.63	67.19	67.44	66.36
Tulang Bawang	66.08	66.74	67.07	67.7	68.23	68.52	67.39
Pesawaran	62.70	63.47	64.43	64.97	65.75	65.79	64.52
Pringsewu	67.55	68.26	68.61	69.42	69.97	70.30	69.02
Mesuji	59.79	60.72	61.87	62.88	63.52	63.63	62.07
Tulang Bawang Barat	63.01	63.77	64.58	65.30	65.93	65.97	64.76
Pesisir Barat	60.55	61.50	62.20	62.96	63.79	63.91	62.49
Bandar Lampung	74.81	75.34	75.98	76.63	77.33	77.44	76.26
Metro	75.10	75.45	75.87	76.22	76.77	77.19	76.10

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2020 , diolah

Pada Tabel 2 menunjukkan rata-rata IPM kota atau kabupaten Provinsi Lampung tahun 2015 – 2020. IPM tertinggi dipegang oleh Kota Bandar Lampung diikuti oleh Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah berturut-turut pada posisi kedua dan ketiga serta posisi terendah diduduki oleh kabupaten Mesuji. Angka IPM yang didapatkan Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa berhasil memperbaiki angka harapan hidup, pendidikan dan standar kehidupan yang baik bagi masyarakatnya.

Perkembangan IPM di Provinsi Lampung yang rendah diartikan sebagai adanya ketimpangan pendapatan sehingga terjadi ketidakmampuan. Kemiskinan merupakan kondisi dari individu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemiskinan bisa memiliki dampak yang perlu

diperhatikan dalam pembangunan manusia. Bisa menjadi masalah yang serius karena berawal dari ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok dan melalaikan kebutuhan yang lain seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam pembangunan manusia antara keduanya yang pada gilirannya menyebabkan sasaran mencapai IPM yang telah ditetapkan (Sulistio Mirza, 2012).

(Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf, 2014) mengatakan bahwa tingkat kemiskinan mempunyai dampak negatif terhadap IPM. Kemudian (Ningrum et al., 2020) menyimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai dampak signifikan terhadap IPM. (Zulham et al., 2017) yang menyatakan kemiskinan memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap IPM. Hasil yang sama dilakukan oleh (Adelfina & Jember, 2016) yang mendapatkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Ketika kemiskinan terus bertambah maka akan terciptanya lingkaran setan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dampak dari hal ini dapat dilihat dari penurunan pendapatan riil yang mengakibatkan penurunan permintaan, yang pada akhirnya mengurangi investasi dan berpotensi merosotnya produktivitas. Kegiatan produktif yang bisa memberikan perbaikan kepada kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan semakin bertambah, maka individu tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang baik serta berakibat pada populasi yang tertinggal dalam pendidikan. Akibatnya, keahlian untuk mengelola sumber daya alam yang produktif tidak berjalan baik (Todaro, Michael.P dan Smith, 2006).

Seperti yang terlihat di Table 3, bahwa jumlah masyarakat miskin terbanyak di Provinsi Lampung pada 2017 berada di Kabupaten Lampung Utara disusul Kabupaten Pesawaran dan Pesisir Barat pada posisi kedua dan ketiga. Sedangkan jumlah masyarakat miskin terendah berada di Kabupaten Mesuji. Tahun 2020 masyarakat miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Utara dan penduduk miskin paling sedikit berada di Kabupaten Mesuji.

Tabel 3 Hubungan Jumlah Persentase Penduduk Miskin dengan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2020 (Persen)

Wilayah	Penduduk Miskin (%)				IPM			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	14.32	13.54	12.92	12.52	66.06	66.74	67.50	67.80
Tanggamanus	13.25	12.48	12.05	11.68	64.94	65.67	66.37	66.42
Lampung Selatan	15.16	14.86	14.31	14.08	66.95	67.68	68.22	68.36
Lampung Timur	16.35	15.76	15.24	14.62	68.05	69.04	69.34	69.37
Lampung Tengah	12.90	12.62	12.03	11.82	68.95	69.73	70.04	70.16
Lampung Utara	21.55	20.85	19.90	19.30	66.58	67.17	67.63	67.67
Way Kanan	14.06	13.52	13.07	12.9	65.97	66.63	67.19	67.44
Tulang Bawang	10.09	9.70	9.35	9.33	67.07	67.70	68.23	68.52
Pesawaran	16.48	15.97	15.19	14.76	64.43	64.97	65.75	65.79
Pringsewu	11.30	10.50	10.15	9.97	68.61	69.42	69.97	70.30
Mesuji	7.66	7.55	7.47	7.33	61.87	62.88	63.52	63.63
Tulang Bawang Barat	8.11	8.10	7.75	7.39	64.58	65.30	65.93	65.97
Pesisir Barat	15.61	14.98	14.48	14.29	62.20	62.96	63.79	63.91
Bandar Lampung	9.94	9.04	8.71	8.81	75.98	76.63	77.33	77.44
Metro	9.89	9.14	8.68	8.47	75.87	76.22	76.77	77.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2020 , diolah

Table 3 menunjukkan bahwa adanya hubungan dari total penduduk miskin terhadap IPM. Banyaknya masyarakat miskin berpengaruh negatif terhadap IPM. Dapat dilihat yang terjadi di Kota Bandar Lampung dengan adanya banyak penurunan penduduk miskin maka terjadi peningkatan angka IPM. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Lampung seiring waktu berfluktuatif, maka untuk meminimalkan fluktuasi beberapa insiatif diperlukan standar hidup layak, yang merupakan bagian lain dari kualitas hidup manusia juga merupakan indikator kemiskinan.

Pengangguran adalah keadaan di mana jumlah pekerja yang meningkat tidak bisa seimbang dengan total pekerjaan yang diberikan dari aktivitas perekonomian yang baru. Dalam demografi menjelaskan, "angkatan kerja" adalah individu yang mencari pekerjaan dan masuk ke dalam populasi. Angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai seorang yang berusia 15 hingga 64 tahun yang sedang dalam pencarian kerja dan bekerja. Maka dari itu, pengangguran yaitu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahun, sementara pengambilan

tenaga pekerja tidak meningkat, dapat menyebabkan pengangguran menjadi masalah yang semakin serius karena penduduk terus bertambah dan jumlahnya tidak sedikit. Disamping itu ada sektor bisnis yang mengalami kebangkrutan sehingga harus memberhentikan karyawan. Tingkat pengangguran berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan. Pengangguran terbuka adalah satu jenis pengangguran yang merupakan angkatan kerja yang masih belum dapat pekerjaan serta aktif mencari pekerjaan (Masriah, 2011) dalam (Ningrum et al., 2020).

Pengangguran merupakan salah satu prioritas tujuan pembangunan yang harus dikurangi. Tingkat pengangguran diukur dengan beberapa indikator. Dalam analisis ini, indikator pengangguran adalah tingkat pengangguran yang dipublikasikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Digunakan untuk menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu wilayah.

(Baeti et al., 2013) mengatakan bahwa pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak pula, sehingga kesejahteraan mereka tidak terpenuhi.

(Meydiasari & Soejoto, 2017) menjelaskan bahwa variabel dari pengangguran memberikan pengaruh yang negatif serta signifikan terhadap IPM. Kemudian (Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf, 2014) mengatakan bahwa variable TPT berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal yang sama dikatakan oleh (Baeti et al., 2013) dimana variable pengangguran mempunyai dampak negatif terhadap IPM.

Tabel 4 Hubungan Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2020 (Persen)

Wilayah	TPT				IPM			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	0.96	2.76	1.68	2.13	66.06	66.74	67.50	67.80
Tanggamus	5.08	2.23	2.98	2.96	64.94	65.67	66.37	66.42
Lampung Selatan	4.80	4.49	4.70	5.19	66.95	67.68	68.22	68.36
Lampung Timur	3.89	3.83	2.89	2.64	68.05	69.04	69.34	69.37
Lampung Tengah	3.08	2.52	2.62	4.22	68.95	69.73	70.04	70.16
Lampung Utara	5.62	4.87	5.09	5.34	66.58	67.17	67.63	67.67
Way Kanan	2.88	4.45	3.60	3.56	65.97	66.63	67.19	67.44
Tulang Bawang	3.47	3.53	4.04	4.84	67.07	67.7	68.23	68.52
Pesawaran	5.73	4.64	4.42	4.64	64.43	64.97	65.75	65.79
Pringsewu	4.63	4.13	4.95	5.77	68.61	69.42	69.97	70.30
Mesuji	0.65	3.80	3.62	3.71	61.87	62.88	63.52	63.63
Tulang Bawang Barat	1.86	2.93	3.59	3.46	64.58	65.30	65.93	65.97
Pesisir Barat	2.71	1.90	3.26	3.41	62.20	62.96	63.79	63.91
Bandar Lampung	8.10	7.28	7.12	8.79	75.98	76.63	77.33	77.44
Metro	4.64	5.79	5.11	5.40	75.87	76.22	76.77	77.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2017-2020 , diolah

Table 4 menunjukkan bahwa ada kemungkinan keterkaitan antara jumlah tingkat pengangguran terbuka dengan IPM. Jumlah TPT yang tinggi akan berpengaruh terhadap IPM. Dapat dilihat yang terjadi Kota Bandar Lampung dengan menurunnya jumlah TPT maka terjadi kenaikan angka IPM. Namun sebaliknya di Kabupaten Tulang Bawang terjadi kenaikan jumlah TPT tetapi IPM juga mengalami kenaikan. Terlihat bahwa jumlah pengangguran di seluruh kabupaten lebih sedikit daripada jumlah pengangguran di kabupaten di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia di perkotaan.

Ginting (2008) dalam (Zulham et al., 2017) menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan adalah identik dengan pembangunan manusia di Indonesia. Karena tenaga kerja adalah aset utama penduduk miskin, investasi dalam kesehatan dan pendidikan akan lebih berarti untuk masyarakat miskin daripada masyarakat mampu. Jika fasilitas kesehatan dan pendidikan tersedia, produktivitas masyarakat akan lebih baik, dan akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Untuk

melakukan pembangunan, pemerintah membutuhkan orang yang berkualitas. Dalam posisinya sebagai subjek dan objek pembangunan, manusia juga merupakan sasaran dan subjek pembangunan. Untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan, dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Akibatnya, investasilah yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan produktifitas dari pembangunan SDM. Perlu diperhatikan pendidikan dan kesehatan yang dimiliki oleh manusia dalam mencapai tujuan pembangunan yang penting di setiap negara.

Belanja daerah memiliki peran penting dalam membangun masyarakatnya, karena mendorong penyediaan fasilitas yang tidak bisa disediakan Swasta. Belanja daerah dibagi menjadi dua yakni berdasarkan ekonomi serta fungsi. Belanja daerah bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang terdiri dari belanja harian dan belanja pembangunan untuk memungkinkan masyarakat mencapai taraf hidup yang layak sesuai indikator IPM. Keberlanjutan pembangunan ekonomi memerlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. (Tambunan, 2001).

(Sanggalorang et al., 2015) menyebutkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Selain itu (Tjodi et al., 2019) menyebutkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberikan pengaruh yang positif serta signifikan kepada IPM. Tidak sama dengan perolehan analisis (Muliza, 2017) dimana pengeluaran untuk pendidikan berdampak negatif serta signifikan kepada IPM.

Tabel 5 Alokasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2015-2020 (Persen)

Wilayah	Persentase Alokasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan						Rata-Rata	Rata-Rata IPM
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Lampung Barat	2.64	23.48	23.81	26.75	27.11	28.45	19.17	66.06
Tanggamus	1.06	31.96	34.76	33.36	31.94	32.27	25.29	65.01
Lampung Selatan	1.09	30.64	29.95	31.37	31.37	29.70	23.26	66.85
Lampung Timur	2.17	36.39	38.06	0.04	37.45	32.12	19.17	68.28
Lampung Tengah	1.02	39.12	36.45	37.19	35.96	35.35	28.45	68.93
Lampung Utara	1.64	30.43	31.70	31.61	34.06	30.29	23.85	66.51
Way Kanan	3.01	30.12	23.37	24.28	28.09	24.20	20.19	66.14
Tulang Bawang	2.17	19.58	22.51	22.52	26.22	25.58	16.70	67.16
Pesawaran	1.98	30.67	30.58	29.28	33.05	31.98	23.13	64.26

Pringsewu	2.36	34.28	33.51	33.56	34.23	33.24	25.93	68.76
Mesuji	4.43	20.32	20.68	19.28	23.51	23.84	16.18	61.76
Tulang Bawang Barat	1.58	25.70	28.01	25.33	26.76	27.00	20.16	64.52
Pesisir Barat	2.51	19.11	17.79	20.10	23.72	22.83	14.88	62.20
Bandar Lampung	2.02	40.84	36.92	34.17	32.22	29.19	28.49	76.02
Metro	4.46	3.63	24.78	24.33	22.16	21.04	14.30	75.88

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2020 , diolah

Table 5 menunjukkan jumlah persentase perkiraan pengeluaran daerah untuk pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 bahwa alokasi pendanaan pendidikan sebesar dua puluh persen dari APBD. Dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki persentase tinggi menunjukkan angka Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi juga. Alokasi pengeluaran untuk pendidikan berpengaruh terhadap IPM.

Tabel 6 Alokasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2015-2020 (Persen)

Wilayah	Persentase Alokasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan						Rata-Rata	Rata-Rata IPM
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Lampung Barat	2.97	7.50	11.64	14.96	14.83	18.21	10.38	66.06
Tanggamus	2.55	8.80	8.50	9.73	10.63	12.40	8.04	65.01
Lampung Selatan	1.02	13.43	15.09	13.69	15.77	17.88	11.80	66.85
Lampung Timur	1.65	8.06	9.30	8.84	11.18	13.36	7.81	68.28
Lampung Tengah	1.24	8.24	7.73	7.56	9.45	10.83	6.84	68.93
Lampung Utara	4.19	6.57	11.47	12.43	12.36	13.28	9.40	66.51
Way Kanan	2.61	8.52	9.36	10.60	12.00	10.96	8.62	66.14
Tulang Bawang	5.77	13.53	14.42	13.43	13.79	18.01	12.19	67.16
Pesawaran	1.67	7.65	7.52	10.05	10.26	11.83	7.43	64.26
Pringsewu	2.62	12.39	10.15	11.13	12.22	16.53	9.70	68.76
Mesuji	2.50	6.77	8.55	8.76	10.01	17.19	7.32	61.76
Tulang Bawang Barat	3.95	11.89	8.90	10.33	9.33	12.32	8.88	64.52
Pesisir Barat	4.08	4.62	9.80	9.52	9.41	12.13	7.49	62.20
Bandar Lampung	2.04	10.81	11.74	12.90	13.64	13.10	10.23	76.02
Metro	4.58	4.83	25.05	23.82	27.65	31.54	17.18	75.88

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2020 , diolah

Table 6 menunjukkan jumlah persentase perkiraan dana pengeluaran untuk kesehatan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang -

Undang No. 36 Tahun 2009 besarnya perkiraan dana kesehatan minimum sebesar 10% dari APBD di luar gaji. Dapat dilihat kabupaten/kota yang memiliki persentase rendah menunjukkan angka IPM yang rendah juga. Namun di beberapa kabupaten seperti Lampung Timur dan Lampung Tengah dengan persentase alokasi anggaran kesehatan yang cukup rendah dapat menunjukkan nilai IPM tinggi dari daerah yang lain

(Tjodi et al., 2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan. (Sanggalorang et al., 2015) menyebutkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM. (Zulham et al., 2017) menerangkan bahwa belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Menurut (Priambodo, 2015) mengalokasikan dana yang didapatkan oleh pajak untuk membangun sarana prasarana, perbaiki layanan untuk masyarakat baik dari sektor pendidikan maupun kesehatan, tidak lupa bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkannya. Perlu diketahui pembangunan infrastruktur akan membutuhkan tenaga manusia yang banyak demi mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk memahami dan menganalisa pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran dan belanja daerah alokasi pengeluaran publik seperti bidang pendidikan dan kesehatan, terhadap pembangunan manusia untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam proses pembangunan manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh alokasi belanja daerah sektor pendidikan, alokasi belanja daerah sektor kesehatan, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh alokasi belanja daerah sektor pendidikan, alokasi belanja daerah sektor kesehatan, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja daerah sektor pendidikan, alokasi belanja daerah sektor kesehatan, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja daerah sektor pendidikan, alokasi belanja daerah sektor kesehatan, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait khususnya pemerintah dalam langkah-langkah meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Lampung
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak bahan kepustakaan dan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian selanjutnya, khususnya tentang Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Peran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan semua pengeluaran kas daerah yang berlaku. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, diantaranya:

a. Model Pembangunan *Rostow* dan *Musgrave*

Model ini menggambarkan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dan tahapan pembangunan ekonomi, termasuk tahap awal pembangunan ekonomi. Pada tahap ini, pemerintah harus menyediakan segala jenis infrastruktur, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga proporsi investasi pemerintah terhadap total investasi relatif besar. Meskipun peran investasi pemerintah masih diperlukan pada fase berikutnya untuk merangsang dan membangun momentum pertumbuhan ekonomi, peran investasi swasta semakin besar pada fase ini. Kehadiran intervensi swasta menyebabkan kegagalan pasar dan mengharuskan negara menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar. Tahap ini disebut tahap tengah pembangunan ekonomi. Pada tahap terakhir, yaitu tahap perekonomian yang lebih maju, kata Rostow, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi bergeser dari penyediaan infrastruktur ke pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti program pensiun dan layanan kesehatan masyarakat. Menurut Musgrave, proses pembangunan menjadi nyata karena proporsi investasi swasta terhadap GNP lebih besar dibandingkan dengan investasi pemerintah.

Menurut Aan Jaelani (2018), Model pembangunan Rostow-Musgrave memberikan kerangka dasar untuk meningkatkan belanja pemerintah dan meningkatkan peran

pemerintah. Meskipun setiap negara mengalami perkembangan berdasarkan sejarah perkembangannya, namun belum dapat dipastikan apakah pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara bertahap atau terjadi secara bersamaan.

b. Hukum Wagner mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah

Aan Jaelani (2018), Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Menurut Musgrave, kondisi demikian disebut sebagai "*law of growing public expenditures*". Peningkatan ini terletak pada kegiatan dan kebutuhan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah. Hukum Wagner menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah, semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah, dan pengeluaran negara.

Hukum Wagner mengasumsikan adanya hubungan positif antara pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah. Lebih lanjut, meskipun undang-undang ini didasarkan pada pengamatan empiris negara-negara maju, namun tidak didasarkan pada teori pemilihan barang publik yang dapat menyebabkan kegagalan pasar dan eksternalitas. Pemikiran ini didasarkan pada teori pemerintahan organik (*organic state theory*), yang memandang pemerintah sebagai individu independen yang berbeda dengan anggota masyarakat lainnya.

2. Definisi Pembangunan

Pembangunan yaitu peningkatan dengan waktu yang lama didukung oleh kemampuan negara dalam memberikan komoditas pada masyarakatnya. Keahlian ini berkembang seiring majunya teknologi, serta perubahan filosofis dan institusional yang dibutuhkan. Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5) Ekonomi dibangun tidak secara bersamaan; sebaliknya, itu adalah perubahan yang terjadi secara alami dan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena perubahan dari perdagangan dan industri. Pendapatan perkapita dan nasional berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Pendapatan Nasional yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun perekonomian, sedangkan pendapatan per kapita yaitu penghasilan rerata dari penduduk daerah. Penjumlahan pendapatan perkapita dan nasional dari waktu ke waktu bisa digunakan dalam menentukan laju perkembangan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pembangunan dari ekonomi dijadikan acuan dalam proses menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita suatu masyarakat pada waktu yang panjang.

3. Definisi Pembangunan Manusia

Pada dasarnya pembangunan manusia berarti memberikan lebih banyak opsi untuk masyarakat bersama keinginan kehidupan yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini, harus memperhatikan mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta aspek lain untuk meningkatkan produktivitas manusia. Oleh karena itu, paradigma pembangunan manusia terdiri dari dua sisi. Satu sisi terdiri dari informasi tentang kemampuan individu, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Sisi lain terdiri dari penggunaan keahlian manusia untuk tujuan yang produktif, kultural, sosial, dan politik.

Menurut UNDP (1995), beberapa premis utama dalam pembangunan individu adalah:

- a. Fokus utama pembangunan harus berorientasi penduduk.
- b. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan opsi yang tersedia bagi masyarakat, bukan sekedar peningkatan pendapatan saja. Oleh karena itu, bentuk pembangunan perlu memperhatikan aspek keseluruhan masyarakat, bukan ekonomi saja.
- c. pembangunan bukan hanya tentang menambah keahlian individu, namun mengoptimalkan pemanfaatan keahlian manusia.
- d. Pembangunan tidak lepas dari dukungan empat pilar yakni pemberdayaan, produktivitas, kesinambungan, dan pemerataan.
- e. Konsep pembangunan ini menjadi acuan menentukan keinginan dan mengevaluasi bervariasi opsi untuk menggapainya.

Maka dengan ini penduduk diposisikan tujuan utama pembangunan, sementara usaha pembangunan diartikan dengan alat untuk menggapai keinginan tersebut.

Dalam memastikan terwujudnya tujuan pembangunan, 4 aspek utama yakni :

- a) Produktivitas, masyarakat butuh mengembangkan produktivitas serta partisipasi aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan

pendapatannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi menjadi komponen integral pada IPM.

- b) Pemerataan, setiap individu wajib mempunyai peluang yang sama untuk mengakses sumber mata pencaharian, serta sosial. Seluruh hambatan yang menghalangi peluang itu perlu diatasi, sampai semua orang bisa merasakan benefit kesempatan yang ada dan ikut serta dalam aktivitas produktif yang berkontribusi pada peningkatan mutu hidup.
- c) Kesenambungan, penting untuk memastikan bahwa hubungan kepada sumber ekonomi sosial tidak hanya terjamin untuk generasi saat ini namun untuk masa yang akan datang. Sumber daya baik lingkungan, fisik, serta manusia harus selalu ditingkat supaya tetap berkelanjutan.
- d) Pemberdayaan partisipasi penuh penduduk dalam proses pengambilan keputusan serta rencana yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini juga termasuk keterlibatan dalam jalannya pembangunan, memungkinkan mereka berkontribusi menentukan bentuk dan arah pembangunan.

4. Indeks Pembangunan Manusia

a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut data dari BPS, IPM ini istilah dari program yang diciptakan oleh PBB tahun 1990. Konsep ini kemudian disebarluarkan melalui laporan yang diberikan dengan laporan pembangunan manusia. Dalamnya berisi mengenai penilaian setiap tahun mengenai IPM.

IPM merupakan satu indikator yang bermanfaat untuk mengevaluasi taraf pembangunan manusia, dari aspek fisik (kesejahteraan dan kesehatan) maupun aspek non-fisik (intelektualitas). Dalam dimensi fisik, pengaruh pembangunan dari angka harapan hidup dan daya beli penduduk. Sementara dalam dimensi yang kedua dampak pembangunan tercermin dalam mutu pendidikan yang didapatkan masyarakat.

Variable-variable dalam IPM terdiri dari:

1. Angka Harapan Hidup Ketika Lahir- AHH (*Life Expectancy – e₀*)

Angka harapan kehidupan saat lahir adalah rerata total tahun yang sudah dijalani mulai lahir. AHH sendiri dihitung berdasarkan sensus yang dilakukan dan pengamatan kependudukan, menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat.

2. Rata-rata durasi sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)

Total tahun yang dipergunakan setiap individu untuk mengikuti sekolah formal dinamakan rata-rata lama sekolah. Diasumsikan bahwa lama sekolah rata-rata suatu wilayah tidak akan menurun dalam kondisi normal. Orang yang berusia 25 tahun ke atas adalah bagian dari populasi yang diolah berdasarkan lamanya sekolah.

3. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)

Total tahu sekolah yang diinginkan anak bisa pergi saat mereka usia tertentu. Ada asumsi bahwa kemungkinan anak itu tetap melanjutkan studinya pada usia selanjutnya, sebanding pada kemungkinan orang yang berpendidikan per total orang pada usia yang sama. Angka harapan lama sekolah berlaku pada orang berumur tujuh tahun ke atas. HLG bisa dipergunakan untuk memahami keadaan pembangunan teknik pendidikan dibervariasi jenjang. Ini diperlihatkan melakukan jangka waktu belajar yang diharapkan setiap siswa.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Nilai dana keluar perkapitas dan paritas daya pembelian menentukan dana keluar perkapita yang disesuaikan. Belanja perkapita tahunan rata-rata didapatkan dari susenas, yang dihitung mulai provinsi sampai kabupaten.

b. Ukuran Perkembangan IPM

IPM dibuat dengan memakai pendekatan tiga dimensi dasar untuk memahami pembangunan sumber daya manusia. berdasarkan beberapa elemen utama mutu hidup. Di antara dimensi tersebut adalah kehidupan yang layak, umur panjang, sehat, dan berilmu. Indikator IPM angka harapan hidup saat lahir (kesehatan), lamanya bersekolah, dan harapan lama sekolah (pengetahuan), kemampuan daya beli keperluan pokok. dan pendapatan serta pengeluaran perkapita (hidup layak).

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

IPM < 60 : IPM rendah

$60 \leq \text{IPM} < 70$: IPM sedang

$70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM tinggi

$\text{IPM} \geq 80$: IPM sangat tinggi

Perhitungan IPM menurut BPS dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Untuk menghitung indeks masing-masing dari komponen IPM dengan hubungan matematis sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\min}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\min}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\min}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran : } I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Keterangan:

AHH : Angka harapan hidup

HLS : HARapan lama sekolah

RLS : Rata-rata lama sekolah

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut:

Table 7 Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Alma Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan		100	1.007.436*	107.721	26.572.352**
		(PPP U\$)	(Rp)	(PPP U\$)	(Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik

5. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan oleh Bappenas (2016) yaitu suatu keadaan individu atau kelompok individu tanpa terkecuali tidak dapat menjalankan hak dasar mereka untuk menjalani hidup yang martabat. Badan Pusat Statistik mengatakan Ketidakmampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, yang mencakup primer dan sekunder didefinisikan sebagai kemiskinan. Indikator atau patokan dari perolehan Widyakarya Pangan dan Gizi digunakan oleh badan pusat statistik. Di mana kemiskinan didefinisikan pemenuhan standar keperluan makanan, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu banyaknya nilai yang dikeluarkan 52 komoditas dasar makanan yang sebenarnya dimakan oleh masyarakat, dan lalu dicocokkan dengan 2100 kkl per kapita setiap harinya. Di sisi lain, jika kemiskinan didefinisikan sebagai memenuhi standar keperluan di luar makanan, Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah total nilai minimal butuhnya dari komoditas di luar makanan.

Permasalahan kemiskinan dilihat dari beberapa segi yakni banyaknya penduduk miskin, kurangnya pendidikan (terutama buta huruf), masalah kesehatan (naiknya tingkat kematian bayi dan kekurangan gizi), tenaga kerja, perekonomian (konsumsi perkapita). Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu unsur penting dalam kemiskinan adalah tidak mampunya pemenuhan kebutuhan hidup dasar seperti sandang, pangan dan papan; ketidakadaan akses untuk kebutuhan hidup yang lain seperti air bersih, transportasi, kebersihan, pendidikan dan kesehatan; kurangnya jaminan untuk masa depan dikarenakan tidak ada investasi; rentan akan perubahan sosial dan ekonomi; dan rendahnya kualitas sumber daya.

Tingkatan kemiskinan berdasarkan Nurkse, 1953 dalam Kuncoro, (1997) umumnya dan disederhanakan dalam 3 jenis, yakni:

1. Ketidakmampuan Absolut

Jika pendapatan seseorang ada di tingkat rendah dari garis kemiskinan dan ketidakcukupannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seseorang dianggap miskin absolut. Tujuannya yaitu guna melihat tingkatan minimum pendapatan yang cukup dalam pemenuhan keperluan fisik. Mulai makanan, pakaian, rumah untuk menjamin keberlangsungan hidup. Masalah utama konsep ini yaitu menentukan tingkat minimum keperluan dan komposisi, jadi keduanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan serta faktor ekonomi seperti iklim dan kemajuan negara. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial seseorang, mereka membutuhkan barang dan jasa.

2. Ketidakmampuan Relatif

Jika individu bisa memenuhi keperluan utama hidupnya mereka dianggap miskin secara relative tetapi status mereka rendah daripada keadaan masyarakat yang ada di lingkungannya. Menurut gagasan, garis ketidakmampuan berubah diiringi oleh perubahan tingkat kehidupan mereka, menunjukkan bahwa teori kemiskinan bisa ditunjukkan dari sudut pandang perbedaan status sosial, yang bermakna semakin tinggi ketidaksamaan holongan baik diatas dan bawah dalam hal tingkat penghidupan, semakin tinggi juga total orang yang bisa di juluki miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Jika seseorang dan kelompok dalam bermasyarakat menunjukkan sikap yang tidak bisa berubah untuk mutu kehidupannya meskipun ada upaya dari pihak yang lain untuk mendukungnya, atau jika seseorang itu miskin akibat sikapnya sendiri yaitu tidak bisa memperbaiki mutu kehidupannya sendiri.

Sharp (dalam Mudrajat, 1997) Sharp berusaha menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dari perspektif ekonomi. Kemiskinan terjadi dikarenakan perbedaan pola sumber daya, yang mengakibatkan pembagian pendapatan yang tidak seimbang. Selain itu, ketidakmampuan dipengaruhi variasi dalam mutu SDM. Rendahnya mutu SDM yang rendah menunjukkan rendahnya produktif, yang akan menghasilkan upah yang lebih rendah. Selain itu dikarenakan pendidikan yang rendah, ketidakberuntungan nasib, perbedaan, dan modal yang dimiliki.

Mudrajad Kuncoro (2006) menerangkan indikator ketidakmampuan yakni :

- a. Garis ketidakmampuan BPS, dimana batas-batas yang dipakai negara berbeda. Perbedaan standar hidup, jumlah pengeluaran setiap bulan yang dilakukan oleh badan pusat statistic (BPS) untuk mencapai keperluan minimum mulai makanan sebesar 2.100 kalori, belanja bukan makanan masuk kedalam pakaian, rumah, dan variasi barang dan jasa.
- b. Garis kemiskinan Sajogyo (1977) paling terkenal lainnya, bertahan setiap tahun yang berbeda memakai ketidakmampuan berbasis beras. Sajogyo menjelaskan batas garis ketidakmampuan tingkatan konsumsi setiap tahun yang sebanding sama total beras yang dikonsumsi.

Teori lingkaran setan pada kemiskinan yang dijelaskan oleh Ragnar, bahwa penyebab kemiskinan adalah ketertinggalan dan keterbelakang SDM yang ditunjukkan melakukan IPM yang rendah, ketidaksempurnaan pasar, dan minimnya modal yang berakibat kepada minimnya produktivitas, yang menyebabkan besarnya pengangguran. Minimnya produktivitas menyebabkan minim juga pendapatan (yang ditunjukkan melalui minimnya upah yang didapatkan),serta mengakibatkan minimnya investasi sehingga proses penciptaan lapangan kerjapun rendah.

Teori lingkaran setan kemiskinan yang diajukan oleh Nurkse yakni bahwa dalam negara yang memiliki produktivitas rendah, rendahnya pendapatan masyarakat akan menghasilkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Karena pendapatan yang minim, masyarakat sulit untuk menabung, padahal tabungan berperan penting dalam pembentukan modal ekonomi. Rendahnya tingkat tabungan mengakibatkan investasi menjadi terhambat, sehingga mengakibatkan kurangnya modal untuk pembangunan ekonomi. Kondisi ini menciptakan siklus yang berkelanjutan, di mana rendahnya modal berdampak pada investasi yang rendah, yang pada gilirannya kembali merendahkan tingkat modal. Hal ini menghasilkan lingkaran setan yang menyebabkan negara terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut.

6. Pengangguran

Pengangguran menunjukkan keadaan seseorang yang belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja maupun yang dalam proses pencarian pekerjaan. Masalah pengangguran begitu serius sehingga setiap upaya dalam rencana pembangunan ekonomi selalu menekankan tujuan untuk meminimalisir tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan masalah dari makroekonomi memiliki dampak kepada indivisi dan satu masalah kompleks setiap negara. Pengangguran bisa mempengaruhi tekanan psikologi dari individunya.. (Mankiw, 2003).

Sadono S menjelaskan pengangguran dapat digolongkan ke dalam empat golongan berdasarkan cirinya:

- a. Pengangguran Terbuka: ketika jumlah lapangan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Individu dalam kategori ini secara nyata dan sepenuh waktu menganggur. Faktor-faktor seperti penurunan kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi, atau kemunduran dalam industri tertentu dapat menyebabkan pengangguran terbuka.
- b. Pengangguran Tersembunyi: muncul pada sektor pertanian atau pemberi jasa. Terjadi ketika suatu aktivitas ekonomi menggunakan banyak pekerja melebihi kebutuhannya dalam menjalankan kegiatan tersebut secara efisien. Kelebihan pekerja yang dikai ini disebut sebagai pengangguran tersembunyi. Misalnya, banyaknya pelayan restoran daripada yang dibutuhkan atau petani yang seluruh anggota keluarganya bekerja pada lahan yang kecil.
- c. Pengangguran Bermusim: Terjadi pada saat-saat tertentu, seperti musim hujan yang menghalangi pekerjaan penyadap karet dan nelayan, atau musim kemarau yang menghambat pekerjaan para petani. Jika selama periode tersebut individu tidak mencari pekerjaan alternatif, mereka dianggap menganggur. Ini disebut pengangguran bermusim.
- d. Setengah Menganggur: Terjadi terutama dalam konteks migrasi dari pedesaan ke perkotaan di negara berkembang. Sebagian individu yang berpindah ke kota dengan mudah mendapatkan pekerjaan penuh. Sebagian tidak menganggur, namun sebagian lagi bekerja tidak penuh waktu. Jam kerjanya dbilang sedikit daripada normalnya, seperti beberapa hari pada seminggu ataupun beberapa jam sehari. Keadaan seperti ini disebut setengah menganggur.

Perbandingan total pengangguran dengan total Angkatan kerja ditunjukkan melalui persentase, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Penelitian ekonomi, yang mendalam, permasalahan pengangguran dijelaskan secara detail dan cermat melalui bervariasi macam pengangguran didasarkan penyebabnya, di antaranya:

- a. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*): yakni individu pekerja yang mencari pekerjaan lebih baik atau sejalan dengan keinginannya dan dalam prosesnya meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan antara waktu, lokasi, dan informasi yang tersedia tentang lowongan pekerjaan.
- b. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*) : Ini bisa terjadi ketika perubahan teknologi atau pergeseran permintaan pasar menyebabkan pekerjaan tertentu menjadi tidak relevan atau tidak diperlukan lagi.
- c. Pengangguran Siklis atau Konjungtur (*Cyclical Unemployment*): Terjadi sebagai hasil dari fluktuasi ekonomi siklus bisnis. Pengangguran ini muncul ketika permintaan agregat menurun dalam suatu periode resesi atau kontraksi ekonomi, mengakibatkan penurunan produksi dan pengurangan lapangan kerja.
- d. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*): Merupakan pengangguran yang berhubungan dengan naik turun aktivitas perekonomian waktu yang tidak lama, terutama terjadi dalam sektor-sektor yang dipengaruhi oleh perubahan musim. Contohnya, di sektor pertanian di mana pekerjaan sering kali hanya diperlukan selama musim tanam atau panen.

Terdapat beberapa teori yang membahas pengangguran, yaitu:

- a. Keynesian: menyatakan tingkat pengangguran ditentukan oleh tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Menurut materi ini, excess supply atau demand akan selalu ada, dan pengangguran dapat diatasi dengan stimulus fiskal dan moneter untuk meningkatkan permintaan agregat.
- b. Teori Lewis: Teori ini berpendapat banyaknya pekerja adalah peluang, tidaklah suatu permasalahan. Banyaknya pekerja dalam satu bidang dapat berkontribusi

pada tumbuhnya output dan penyedia tenaga kerja di bidang lainnya. Teori ini melihat kelebihan tenaga kerja sebagai aset untuk pembangunan ekonomi.

- c. Teori Fei-Ranis: Teori ini mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang, seperti kelebihan pekerja, SDA yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, sektor pertanian yang dominan, tingginya tingkat pengangguran, dan cepat tumbuhnya penduduk.

Teori Lewis dan Fei-Ranis, terdapat kesamaan dalam pandangan bahwa masalah pengangguran terkait dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pekerja dalam tingkatan pendapatan tertentu. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi dalam bentuk excess supply (penawaran lebih besar daripada permintaan) atau excess demand (permintaan lebih besar daripada penawaran). Namun, perlu dicatat bahwa teori-teori ini mewakili pendekatan berbeda dalam memahami penyebab pengangguran dan solusi yang mungkin diterapkan. Keynesian fokus pada peran permintaan agregat dan intervensi pemerintah, sementara Lewis dan Fei-Ranis lebih menyoroti aspek struktural ekonomi dan pendorong pertumbuhan.

7. Pengeluaran Daerah

Kuangan negara meliputi seluruh kewajiban dan hal negara yang bisa diukut melalui uang dan aset yang dimiliki baik uang dan barang yang mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBDP). Menyesuaikan UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi merujuk pada pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah. Sejalan dengan tugas pemerintah menjadi wewenang daerah, pemerintah daerah mempunyai hal untuk mengalokasikan pengeluaran daerah. Definisi pengeluaran daerah diterangkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 mencakup kewajiban pemerintah daerah yang diakui pengurang total harta yang bersih. Pengeluaran daerah diarahkan membiayai pelaksana tugas dan urusan pemerintahan merupakan wewenang kabupaten / kota atau provinsi, termasuk dalam kategori urusan wajib, pilihan dan penanganannya bisa dilaksanakan bersama – sama.

Susunan APBD menyesuaikan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengelompokkan klasifikasi pengeluaran daerah didasarkan beberapa faktor termasuk kepentingan pemerintah, kelompok, program, fungsi, dan kativitas, serta jenis pengeluarannya. Kelompok pengeluaran berdasarkan urusan pemerintah dibagi menjadi dua yakni pengeluaran urusan wajib dan pengeluaran urusan pilihan daerah. Berikut kelompok pengeluaran berdasarkan organisasi sesuai dengan struktur pemerintah daerah. Disamping itu kelompok didasarkan fungsi dipergunakan dalam menggapai koordinasi dan keselaran dalam mengoordinasikan keuangan negara mulai ekonomi, lingkungan hidup, pelayan umum, ketertiban dan keamanan, serta perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, agama, pendidikan, perlindungan sosial, pariwisata dan budaya. Ada kelompok pengeluaran daerah didasarkan varian pengeluarannya yaitu belanja secara langsung dan tidak langsung. Belanja langsung merujuk pada alokasi anggaran yang langsung terkait pada program, kemudian belanja yang tidak langsung adalah pengeluaran untuk pegawai, bantuan keuangan, hibah, subsidi, dan masih banyak laigi.

8. Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Pendidikan merujuk pada pengalokasian dana dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang diatur melalui berbagai jalur, termasuk alokasi anggaran melalui kementerian/lembaga pemerintah, transfer dana ke daerah untuk pendidikan, serta pengeluaran pembiayaan yang mencakup gaji pendidik, dengan pengecualian anggaran pendidikan dalam bidang dinas, untuk membiayai penyelenggaraan sistem pendidikan dan tanggung jawab pemerintah. Persentase dari anggaran adalah 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

9. Pengeluaran daerah untuk kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan merujuk pada kondisi yang mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu untuk menjalankan kehidupannya dengan baik dalam sektor ekonomi dan sosial. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan dalam setiap aspek pembangunan, sehingga pembangunan nasional perlu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan dianggap sebagai tanggung jawab dari Pemerintah dan masyarakat. Untuk mendukung ini, Undang-Undang

juga menetapkan bahwa anggaran kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota harus setidaknya mencapai sepuluh persen dari total pendanaan pendapatan dan pengeluaran daerah selain gaji.

B. Tinjauan Empiris

Sebelum memulai analisis, peneliti memahami terlebih dahulu penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik dalam penelitian ini, masing-masing penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8 Ringkasan Hasil Penelitian

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
1.	Nur Baeti (2013). Judul: “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”	Alat Analisis: Analisis Data Panel Variabel: 1. Pengangguran 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Pengeluaran Pemerintah	1. Variable pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 3. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2.	Adelfina dan I Made Jember (2016) Judul: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013”	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda Variabel: 1. Pertumbuhan Ekonomii 2. Kemiskinan 3. Belanja Daerah	1. Variable pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 3. Variable belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
3.	<p>Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014).</p> <p>Judul: “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”</p>	<p>Alat Analisis: Regresi Linier Berganda</p> <p>Variabel: 1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran 3. Upah Minimum 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>1. Variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>2. Variable tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>3. Variable upah minimum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>4. Variable laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>
4.	<p>Dewi Azizah Meydiasari dan Prof.Dr.H Ady Soejoto (2017)</p> <p>Judul: “Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia”</p>	<p>Alat Analisis: Analisi Data Panel</p> <p>Variabel: 1. Distribusi Pendapatan 2. Tingkat Pengangguran 3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan</p>	<p>1. Variable distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>2. Variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>
5.	<p>Muliza, T. Zulham, dan Chenny Seftarita (2017).</p>	<p>Alat Analisis: Analisis Data Panel</p> <p>Variabel:</p>	<p>1. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak</p>

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
	Judul: “Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh”	1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 3. Tingkat Kemiskinan 4. PDRB	berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 3. Variable PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
6.	Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, Nurul Huda (2020). Judul: “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam”	Alat Analisis: Analisis Data Panel Variabel: 1. Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran 3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pengeluaran Pemerintah	1. Variable kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM 2. Variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM pada tahun penelitian
7.	Denni Sulistio Mirza (2012) Judul: “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks	Alat Analisis: Analisis Data Panel Variabel: 1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Belanja Modal	1. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variable pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
	Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”		terhadap Indeks Pembangunan Manusia 3. Variable belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
8.	Khusnul Chotimah (2014). Judul: “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur Bagian Selatan”	Alat Analisis: Analisis Data Panel Variabel: 1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 3. Gini Ratio	1. Variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variable pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 3. Variable Gini Ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
9.	Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015) Judul: “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Di Provinsi Sulawesi Utara”	Alat Analisis: Analisis regresi berganda Variabel: 1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	1. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
10.	Novita Dewi (2017) Judul: “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan	Alat Analisis: Regresi linier berganda Variabel: 1. Kemiskinan	1. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

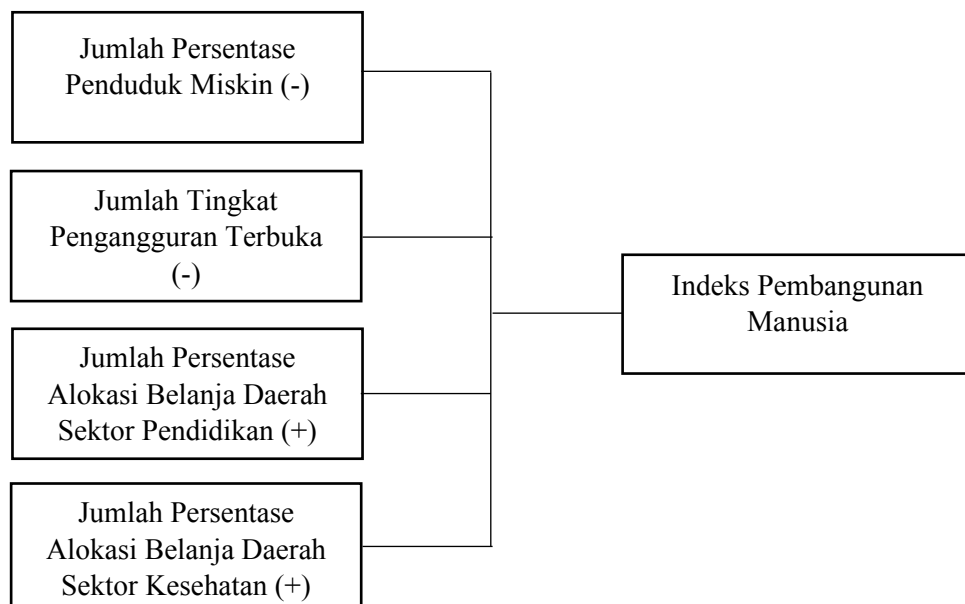
No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
	Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”	2. Pertumbuhan Ekonomi	2. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
11.	Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto (2016) Judul: “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Di Kabupaten Kutai Timur”	Alat Analisis: Regresi linier berganda Variabel: 1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	1. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
12.	Andi Maujung Tjodi, Try Oldy Rotinsulu, dan George M.V Kawung (2018) Judul: “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi”	Alat Analisis: analisis jalur (<i>path analysis</i>) Variabel: 1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 3. Belanja Modal 4. Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

Analisis yang dilaksanakan penulis ini berbeda dari penelitian terdahulu karena gabungan dari inovasi yang sudah diberikan oleh peneliti terdahulu untuk memperbaiki dan memperbaharui, selain itu lokasi dan waktu penelitian yang tidak sama, perbedaan variabel bebas yang digunakan.

C. Kerangka Pemikiran

Minimnya mutu sumber daya manusia berdampak kepada tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat. Minimnya mutu kualitas sumber daya manusia di kabupaten / kota provinsi Lampung terlihat dari pencapaian nilai IPM yang rendah daripada provinsi lain Indonesia. Butuh dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah adalah bentuk pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah dilaksanakan dengan maksud investasi pada SDM dengan keinginan bisa menciptakan SDM yang bermutu baik di masa yang akan datang. Ketidakmampuan yaitu kondisi tidak mampu dalam memenuhi keperluan dasar dan susahya hubungan kepada pekerjaan dan pendidikan. Walaupun telah banyak program tertuju ketidakmampuan namun ketidakmampuan warga Indonesia ini masih kategori tinggi. Susahnya menyelesaikan masalah ini adalah bentuk dari minimnya kualitas SDM Indonesia. Ketidakmampuan bisa berdampak kepada SDM karena warga yang tidak mampu tidak akan berpikir kesehatan dan pendidikan melainkan cara pemenuhan kebutuhan kesehariannya. Saat seseorang tidak kepikiran sekolah, di masa yang akan datang maka mutu hidupnya tidak akan berubah dan akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Belanja sektor pendidikan agar menambah akses warga dalam sekolah yang baik, murah dan bisa menambah angka melek hruu. Pengeluaran daerah untuk kesehatan dapat memperbaiki angka harapan kehidupan maupun untuk meminimalisir angka kematian.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



D. Hipotesis

Hipotesis 1 : Diduga terdapat hubungan positif antara jumlah persentase alokasi belanja daerah di sektor pendidikan dengan IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Hipotesis 2 : Diduga terdapat hubungan positif antara jumlah persentase alokasi belanja daerah di sektor kesehatan dengan IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Hipotesis 3 : Diduga adanya korelasi negatif antara jumlah persentase masyarakat miskin dengan IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Hipotesis 4 : Diduga terdapat hubungan negatif antara jumlah tingkat pengangguran terbuka dengan IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Hipotesis 5 : Diduga alokasi belanja daerah bidang pendidikan, alokasi belanja daerah bidang kesehatan, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, secara bersamaan mmengaruhi secara secara simultan terhadap pembentukan IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian berjenis kuantitatif deskriptif, didukung data sekunder yakni data yang didapatkan dan dieklaurkan oleh lembaga Badan Pusat Statitik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Penelitian memakai empat variabel independent mulai dari belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan, penduduk yang tidak mampu, total tingkat pengangguran terbuka. Kemudian variabel terikatnya adalah IPM. Lokasi penelitian Provinsi Lampung dengan periode 2015 – 2020. Variabel yang dimasukkan untuk analisis ini diringkas dalam bentuk tabel berikut:

Table 9 Ringkasan. Variable Penelitian

No	Nama Variable	Periode	Satuan Pengukuran	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Manusia	Tahunan	Indeks	BPS
2	Alokasi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan	Tahunan	Persentase terhadap APBD	DJPk
3	Alokasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan	Tahunan	Persentase terhadap APBD	DJPk
4	Jumlah Penduduk Miskin	Tahunan	Persentase	BPS
5	Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahunan	Persentase	BPS

B. Definisi Operasional Variable

Berikut adalah penjelasan mengenai definisi dua jenis variabel yang dimanfaatkan untuk analisis:

1. Variable Terikat (*Dependent Variable*)

IPM merupakan variabel terikat yang dimanfaatkan untuk menganalisis. IPM sendiri yakni alat ukur dari kesejahteraan daerah dan negara didasarkan pada umur panjang, pengetahuan, dan hidup sehat. Perlu diketahui harapan hidup ketika lahir salah satu indikator kesehatan, lamanya sekolah serta rerata lama sekolah menjadi

alat ukur pendidikan, dan pendapatan bagian indikator dari kesejahteraan. Rumus dalam perhitungan IPM yakni:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Keterangan:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

2. Variable Bebas (*Independent Variable*)

a. Pengeluaran daerah untuk Pendidikan

Pengeluaran daerah untuk pendidikan adalah pengeluaran dana dari pemerintah ditujukan kepada pendidikan yang dianggarkan dalam APBN dan APBD. Informasi mengenai pemerintah berbelanja untuk kepentingan pendidikan yang menjadi subjek penelitian mencakup realisasi dana keluar di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Lampung periode 2015 -2020. Data yang dikumpulkan berasal dari laman resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan. perimbangan keuangan. Rumus untuk perhitungannya yakni:

$$\frac{\text{Alokasi Belanja Sektor Pendidikan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Pengeluaran daerah untuk Kesehatan

Pengeluaran daerah untuk kesehatan mengacu kepada alokasi pengeluaran yang sudah disusun oleh pemerintah pada APBN dan APBD untuk mendorong perbaikan kesehatan daerah. Informasi mengenai dana pemerintah untuk kesehatan menjadi prioritas utama dalam penelitian ini, melingkup kepada perbelanja pemerintah daerah dalam kesehatan pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung selama tahun 2015 - 2020.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Alokasi Belanja Sektor Kesehatan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Kemiskinan

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok mengalami kekurangan dalam hal-hal yang dianggap sebagai keperluan utama mulai makanan, pakaian, rumah, dan air bersih. Kemiskinan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Selain itu, kemiskinan juga dapat berarti kurangnya komunikasi kepada pendidikan serta peluang bekerja yang bisa mendorong perbaikan masalah ketidakmampuan ini dan memberikan hak serta martabat yang setara untuk seluruh individu masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan merujuk pada persentase jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi tidak mampu di kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama 2015 hingga 2020. Data mengenai kemiskinan ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam persentase per tahun. Rumus yang digunakan persentase masyarakat yang lebih rendah dari garis ketidakmampuan.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka mengacu pada individu yang di dalamnya ada usia kerja yang dan dalam suatu kurun waktu tertentu tidak sedang bekerja, namun dapat untuk bekerja dan tengah aktif mencari pekerjaan. Alasan adanya TPT ini adalah lebih banyak masyarakat yang mencari kerja daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Dalam konteks penelitian, data yang dipergunakan adalah angka pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada 2015 hingga

2020. Data didapatkan dari BPS dengan persen setiap tahun sebagai satuan. Rumus dalam perhitungan tingkat pengangguran terbuka yakni:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

C. Metode Analisis

Analisis data memakai analisis kuantitatif yang melibatkan regresi data panel. Pendekatan data panel menyatukan informasi mulai rentang waktu dan berbagai entitas orang. Data waktu dalam penelitian lima tahun mula 2015-2020. Sedangkan untuk data cross section mulai dari IPM untuk setiap lokasi penelitian yakni 15 daerah. Untuk menerapkan metode ini, digunakan perangkat lunak Eviews 9.

1. Regresi Data Panel

Suatu pendekatan statistik yang mengaitkan penelitian lebih dari satu variabel dalam sebuah unit dengan kurun waktu yang berkelanjutan. Pendekatan ini menggabungkan karakteristik data runtun waktu (*time series*) dan lintas individu (*cross section*). Data panel menggabungkan informasi dari berbagai entitas, seperti provinsi atau kabupaten/kota (cross section), waktu yang tidak sama.

Ada tiga pendekatan penting yang digunakan :

1. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa ada efek umum yang mempengaruhi semua unit individu dalam data panel. Variabel bebas dianggap tidak berkorelasi dengan efek individu disebut dengan Efek Umum/Sederhana
2. Pendekatan yang memperhitungkan efek konstan atau khusus pada masing-masing unit individu dalam data panel. Variabel bebas dianggap berkorelasi dengan efek individu, dinamakan dengan efek tetap.
3. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa efek individu memiliki sifat acak dan tidak adanya korelasi dengan variabel bebas dinamakan efek bebas.

Pemilihan pendekatan dalam analisis regresi data panel tergantung pada karakteristik data dan asumsi yang paling sesuai dengan konteks penelitian. Masing-masing pendekatan mempunyai keunggulan dan kekurangannya dan pemilihan yang tepat akan memastikan hasil analisis yang akurat dan relevan.

Bentuk regresi penelitian :

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 PDDK_{it} + \beta_2 KES_{it} + \beta_3 POV_{it} + \beta_4 TPT_{it} + u_{it}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)

PDDK = Persentase alokasi belanja daerah sektor pendidikan (%)

KES = Persentase alokasi belanja daerah sektor kesehatan (%)

POV = Jumlah penduduk miskin (%)

TPT = Jumlah tingkat pengangguran terbuka (%)

i = 1, 2, . . . n, menunjukkan jumlah lintas individu (*cross-section*).

t = 1, 2, . . . t, menunjukkan dimensi runtut waktu (*time series*).

β_0 = Konstanta (*intercept*).

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ dan β_4 = Koefisien regresi.

μ = *Error term*.

D. Prosedur Analisis Data

Urutan dimana analisis studi dilaksanakan, penelitian ini memakai beberapa tahapan analisis yakni :

1. Metode Estimasi Regresi Data Panel

Saat memperkirakan pemakaian informasi panel, salah satu dari tiga teknik perhitungan biasanya menggunakan model efek umum, tetap, atau acak. Jadi semua teknik ini berbeda menyesuaikan kebutuhan penelitian. Berikut penjelasannya :

a. Common Effect Model

CEM merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa seluruh objek bagian mempunyai titik persimpangan yang sama. Teknik ini mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan individu dalam periode waktu yang berbeda. Berikut persamaan untuk model CEM (Gujarati, 2012):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat individu ke- i dan unit waktu ke- t

X_{1it} dan X_{2it} = Variabel bebas individu ke- i dan unit waktu ke- t

β_0 = Konstanta (*intercept*)
 β_1 , dan β_2 = Koefisien regresi

b. Fixed Effect Model

FEM adalah pendekatan yang adanya asumsi keberadaan titik persimpangan setiap individu, tetapi adanya kesamaan pada koefisien variabel antarindividu dari waktu yang berbeda. Teknik perkiraan data panel memakai variabel dummy dengan nilai nol untuk tidak berdampak dan satu untuk variabel berpengaruh (Kuncoro, 2011). Fungsi dari dummy yakni mendapatkan perbedaan tetap antara individu, Sedangkan Gurajat (2012) menjelaskan teknik persamaan ini dikenal dengan teknik *least squares dummy variable*.

c. Random Effect Model

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015) menjelaskan REM adalah teknik yang memperkirakan variabel pengganggu saling berkaitan kepada individu variabel dan waktu. Teknik ini sering dijuluki *error component model* atau model *Generalized Least Square*.

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Bertujuan untuk memilih antara pendekatan FEM dan CEM yang baik untuk teknik regresi data panel. Prakiraan pengujian penjelasannya dibawah ini :

H_0 = Nilai Probabilitas *Cross Section F* > 0.05 CEM

H_1 = Nilai Probabilitas *Cross Section F* < 0.05 FEM

b. Uji Hausman

Bertujuan menentukan pendekatan dari REM atau FEM yang tepat dipakai dalam regresi data panel. Berikut ini penjelasan prakiraannya :

H_0 = Nilai *Chi Square* > 0.05 REM

H_1 = Nilai *Chi Square* < 0.05 FEM

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji prakiraan didasarkan teknik analitik yang tidak bias atau mengganggu peneliti butuh melaksanakan uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil yang memberikan regresi liner yang tepat dan tidak bias. Uji penyimpangan asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menetapkan pengambilan sampel pada populasi bedistribusi normal. Umumnya dilaksanakan guna memveridikasi data pada penelitian berdistribusi normal. Banyaknya teknik pengujian normalitas mulai dari korelasi regresi, uji- t, dan ANOVA merupakan paramatrik yang berdasarkan kepada distribusi normal data.

b. Uji Multikolinieritas

Asumsi model regresi klasik salah satunya yaitu tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi. (Gujarati & Porter, 2010) menjelaskan multikolinieritas terdapat korelasi yang baik atau tepat pada variabel bebas atau seluruh variabel bebas dalam model regresi. Uji multikolinieritas tujuannya mengetahui model regresi apa terdapat korelasi variabel bebas. Perlu dipahami model regresi dibilang sesuai jika tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam persamaannya. Namun ketika variabel bebas ini memiliki hubungan dengan demikian variabel dikatakan tidak orthogonal. Maksudnya adalah variabel bebas yang nilai korelasinya sama dengan nol.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian tersebut bermaksud mencoba model regresi ada perbedaan varians dari residual masing-masing penelitian lainnya. Heterokedastisitas ada saat variabel pengganggu tidak memiliki varians yang serupa guna seluruh penelitian. Akibatnya dari heterodkedastisitas sendiri estimator OLS tidak bias nmun tidak efisien. Uji white bisa menerangkan apabila nilai probabilitas obs R-Square di bawah 5% dengan demikian data itu mengalami heteroskedastisitas. Akan tetapi apabila nilai probabilitas R-Sqaure lebih besar 5% dengan demikian tidak ada heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah konsep dari analisis data berdasarkan waktu yang sudah diurutkan. Biasanya autokorelasi memakai kurun waktu yang serupa secara kedua kalinya, satu kali berbentuk sebenarnya dan keduanya menggunakan satu periode yang lebih. Namun autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* akan sia-sia semata dan tidak relevan. Karena tidak ada korelasi antara pengamatan dalam unit yang sama pada waktu yang berbeda

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Pengujian ini tujuannya memahami apakah prakiraan yang telah dirumuskan berhubungan parsial baik variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian T salah satu dari pengujian statistic yang digunakan dalam pengujian ketepatan atau kepalsuann prakiraan yang menyebutkan antara dua rerata sampel didapatkan secara bebas dari populasi yang sama tidak berbeda yang signifikan (Sudjiono, 2010).

Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut:

a). Belanja Daerah Sektor Pendidikan

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya variabel PDDK tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

$H_0 : \beta_1 > 0$, artinya variabel PDDK berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

b). Belanja Daerah Sektor Kesehatan

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya variabel KES tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

$H_a : \beta_2 > 0$, artinya variabel KES berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

c). Kemiskinan

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya variabel POV tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

$H_a : \beta_3 < 0$, artinya variabel POV berpengaruh negatif terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

d). Tingkat Pengangguran Terbuka

$H_0 : \beta_4 = 0$, artinya variabel TPT tidak berpengaruh terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

$H_a : \beta_4 < 0$, artinya variabel TPT berpengaruh negatif terhadap IPM di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

b. Uji F (Simultan)

Untuk memperlihatkan keseluruhan variabel bebas yang dipakai untuk pola mempunyai dampak yang bersamaan atau simultan kepada variabel terikat (Ghazali, 2013). Uji prakiraan secara bersamaan dengan memakai pengujian statistic F dan tingkat kepercayaan 95%.

Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 = 0$, keseluruhan variabel bebas secara bersamaan tidak memengaruhi signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 \neq 0$, setidaknya 1 variabel bebas memengaruhi signifikan terhadap variabel terikat.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini tujuannya memahami sejauh apa variabel independent dalam memaparkan dampak variabel dependennya. Harus diketahui koefisien determinasi ini angka yang diberikan sesuai proporsi atau persentase jumlah variansi dalam variabel dependen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel belanja pendidikan mempunyai dampak signifikan dan positif terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Lampung selama periode 2015 – 2020.
2. Variabel belanja kesehatan mempunyai dampak positif tidak signifikan terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Lampung selama periode 2015-2020.
3. Variabel kemiskinan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Lampung selama periode 2015-2020.
4. Variabel TPT berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM kabupaten/kota Provinsi Lampung selama periode 2015-2020.
5. Nilai ekstrim terjadi pada Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan akselerasi pembangunan SDM. Dari tiga dimensi yang mendasari pembangunan manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Oleh karena itu, investasi yang lebih besar dalam pembangunan manusia akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu, wilayah, dan negara, serta merupakan kekuatan pendorong dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan belanja pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung wajib mengalokasikan 20% dari total APBD untuk sektor pendidikan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 49 tentang pendidikan.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan belanja kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 10% dari total APBD untuk sektor kesehatan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan.
4. Disarankan agar Pemerintah daerah provinsi/kota disarankan untuk meningkatkan IPM melalui pengentasan kemiskinan dengan mengacu pada program-program sebelumnya mengenai pengentasan kemiskinan, lapangan kerja dan pertumbuhan, namun dengan lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja yang sesuai. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan dan organisasi pendukung, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, harus dioptimalkan untuk menghindari duplikasi atau pengabaian tujuan pengentasan kemiskinan.
5. Perlu adanya kerjasama pemerintah dan swasta dalam menyediakan berbagai kesempatan kerja serta sekolah dan pelatihan berbasis keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja berdasarkan potensi alam, budaya, dan seni yang dimiliki Provinsi Lampung, oleh karena itu pemerintah provinsi perlu mengelola hal tersebut untuk mengembangkan tingkat pembangunan manusia guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M., & Badshah, I. (2015). Preferences of Institutional Investors at Karachi Stock Exchange. *Int'l Conference on Business, Marketing & Information System Management, 2004*, 1–4. <https://doi.org/10.15242/icehm.ed1115006>
- Adelfina, & Jember, I. made. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 - 2013. *E-Jurnal EP Unud*, 5(10), 1011–1025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2021. Indeks Pembangunan Manusia. Diakses melalui www.lampung.bps.go.id
- Baeti, N., Jurusan, Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Juli, D. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 Info Artikel. *Edaj*, 2(3), 85–98.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS). In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Dewi, N. (Novita), Yusuf, Y. (Yusbar), & Iyan, R. Y. (Rita). (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1).
- Ghozali Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. In *Metode Penelitian Bisnis* (Vol. 53, Nomor 9).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan). Buku Edisi 5. *Salemba. Jakarta*.
- Jaelani, Aan. (2018). Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017. *SSRN Electronic Journal*, 1, 1–14.
- Jhingan, M. L. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Penerjemah D. In *Guritno. PT. Raja Grafindo*.
- Kamilia, F. D., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Periode 2011 Hingga 2013 Dalam

- Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5).
<https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp359-374>
- Kuncoro, M., & Hardani, W. (2013). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi bagaimana meneliti dan menulis tesis? In *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* (Nomor 3).
- Mankiw, N. G. (2003). Teori Makro Ekonomi Terjemahan. In *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Merang Kahang, Muhammad Saleh, & Rachmad Budi Suharto. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi UNMUL*, 18(2).
- Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 01(02).
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nursiah Chalid, & Yusbar Yusuf. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2).
- Priambodo, A. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah*.
- Sanggalorang, S. M. M., Rumat, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerinta di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. <http://Www.Sulutprov.Go.Id/Mengenal-Sulut/Sejarah/>, 15(02), 1–11.
- Sangereng, W., Engka, D. S. M., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara*.
- Sukirno, S. (2013). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. In *RajaGrafindo Persada. Jakarta*.
- Sulistio Mirza, D. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1).
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>

- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(8). <https://doi.org/10.35794/jpekd.23428.19.8.2018>
- Todaro, Michael.P dan Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan. In *Annals of Tourism Research* (Vol. 3, Nomor 1).
- United Nation Development Programme. (1990). *Human Development Report*. New York. Oxford University Press.
- Zulham, T., Seftarita, C., & Muliza. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1).